

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. 2011. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Cet. 1*, Bandung: Revika Aditama.
- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama.
- Andari, S. 2001. *Post Power Syndrome Pada Masa Lanjut Usia*, Media Informasi Penelitian.
- Andasasmita, Komar. 1991. *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris*, Bandung: INI Jawa Barat.
- Anonim, Secretary of State, Matthew Cunlap. 2009. *“Notary Public Handbook and Resource Guide”*, Department of the Secretary of State, Bureau of Corporations, Elections and Commissions.
- Arikunto, Suharmisi. 2006. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Jakarta Press.
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black’s Law Dictionary, sixth edition*, St. Paul Min: West Publishing Co.
- Budiono, Herlien. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Buku Kedua.
- Hunter, Captain Ralph. 2004. *Statement Submitted to United State Senate Special Committee on Aging on Airline Age 60 Rule, 9 Pilot Perspective*.
- Hurlock, E.B. 1996. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang rentang Kehidupan*, Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan.
- Jazim, Hamidi. 2005. *Hermeneutika Hukum*, Cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Katzner. 1980. *The Original Position and the Veil of Ignorance*, Athens: Ohio University Press.
- Lumban Tobing, G. H. S. *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Parkinson, C.N. Rustomji, M.K. da Viera, E. 1990. *Masa Pensiun yang Bahagia*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

- Prajaya, Indra SH. 2012. *Studi Komparatif terhadap Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang - Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Prastiti, H. 2005. *Studi Deskriptif Kecemasan dalam Menghadapi masa pensiun pada Guru SD di Kelurahan Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta - Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*, London: Oxford University
- Ridwan, Juniarso dan Achamad Sodik. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Rosyadi, Rahmat & Sri Hartini. 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Cet. I*, Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI.
- Salman, Otje & Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press.
- S, Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Safa'at, M.A. et al. 2010. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Ghia Indonesia.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Indonesia.
- Tan, Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cet. 1*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wells, Thomas. 1992. *From the Cockpit to the Nursing Home: A Look at the Recent Developments in the Law Concerning The Age-60 Rule*, J. AIR L & COM.
- Winanmo, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

B. Jurnal

- Iskandar Muda. "Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusionalitas Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Konstitusi*, Vol 17 No. 2/Juni 2020.
- Jurgen C.A. de Poorter, (March 2013). "Constitutional Review in the Netherlands: A Joint Responsibility". *Journal Utrecht Law Review*, Vol. 9, Issue 2.

Mahmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.

Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1, November 2012.

Richard Mohr, (June 2007). “Local Court reform and “global” law”. *Journal Utrecht Law Review*, Vol. 3, Issue 1.

Ton van den Brink & Hans van Meerten, (January 2016). “EU Executive Rule-Making and The Second Directive on Institutions for Occupational Retirement Provision”. *Journal Utrecht Law Review*, Vol. 12, Issue 1.

C. Sumber lainnya

Anonim, Badan Pusat Statistik. *Data angka harapan hidup (AHH) di Indonesia*, Diperoleh pada 10 Maret 2021, dari website: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1114>.

Anonim, Professional Pilots Federation. *Age 60 Rule Chronology*, Diperoleh pada 10 Maret 2021, dari website: <http://www.ppf.org/chrono.html>.

Anonim, Aerospace Medical Association. *Aerospace Medical Association Position Paper: The Age 60 Rule*, Diperoleh pada 10 Maret 2021, dari website: <http://www.age60rule.com/docs/asma-position.html>.

Hasanuddin Nasution. *Seputar Usia Pensiun dan Batas Usia Masuk Advokat*. Diperoleh pada 10 Februari 2021, dari website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528efd1640b10/seputar-usia-pensiun-dan-batas-usia-masuk-advokat/>.

Iskandar Muda. “*Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait*,” *Bahan Ajar, Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas YARSI, 2021*. Diperoleh pada 1 Maret 2021, dari website: <https://www.researchgate.net/publication/349095132>.

M.K, Aksell. *Makna keadilan dan macam-macam keadilan beserta contohnya*, Diperoleh pada 10 Februari 2021, dari website: http://aksel17.co.id/2015/09/makna-keadilan-dan-macam-macamkeadilan_13.html.

D. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Keuangan dan fasilitas Hakim agung dan Hakim Konsitusi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indesia, Banten 29-30 Mei 2015.

Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 05/PERKUM/INI/2017 Tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan.